

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASANI KECAMATAN POSO PESISIR BARAT KABUPATEN POSO

Efraym Taona Santo¹
Frans Singkoh²
Josef Kairupan³

Abstrak

Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Masani membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Masani dalam pengembangan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui: Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan, dan agribisnis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan, dan menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Potensi Desa, Kesejahteraan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan kondisi sosial sebuah negara sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat desa merupakan komponen dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Masani membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan pengamatan awal yang penulis lakukan, ditemukan bahwa ada begitu banyak potensi desa yang dapat diberdayakan oleh pemerintah desa. Potensi dalam penelitian ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah

potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparaturnya dan pamong desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi fisik yang ada di desa Masani adalah:

- a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. Kesuburan tanah di desa Masani dapat dikatakan baik, namun pengelolaannya belum maksimal, masih banyak lahan yang dibiarkan kosong tanpa ditanami pohon-pohon baik buah, hortikultura, tanaman tahunan, dan lain-lain.
- b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari, di desa Masani terdapat prasarana air bersih, dimana sumber air bersih yang debit airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa, pemerintah desa dapat membuat saluran-saluran air bersih di beberapa titik agar nantinya dapat digunakan oleh masyarakat, namun potensi ini belum sepenuhnya dikembangkan oleh pemerintah desa.
- c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.
- d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan,

sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.

- e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

Potensi Nonfisik adalah:

- a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong-royongan (mapalus) yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan, namun hal ini mulai berangsur-angsur pudar.
- b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan lain-lain, yang belum maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah desa kurang memberi perhatian lebih kepada organisasi/lembaga yang ada di desa Masani
- c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain, yang belum dikembangkan oleh pemerintah desa.
- d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, belum dimaksimalkan oleh pemerintah desa.

e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa, belum ada inisiatif untuk mengaktifkan lembaga ekonomi ini di desa Masani.

f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mapu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan

kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakatibersama.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut Sedarmayanti, (2008:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2009:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Soekanto (2009:212-213) Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggris di pergunakan kata "Government" yang mana berasal dari suku kata "to govern" keharusan yang tersimpul dalam kata

pemerintah pada umumnya di tuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Mustopadidjaja (2010) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintahan agar prosedur ketata laksanaan dan

bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang akan dicapai. Pemerintahan dalam artian menyeluruh atau holistik tercermin pada istilah kybernologi. Sebab, dalam kybernologi dapat dikatakan tercapu pembaharuan kompleks elemen yang berkaitan dengan seluk beluk pemerintahan, baik dari sisi batasan, filosofi, etika, maupun metodologi. Dalam kesempatan kajian ini, pertama-tama yang tampaknya perlu dipahami adalah eksplanasi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Juliantara, (2010:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif

homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah. c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa

terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat. Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka ataupun tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berhubungan serta berkaitan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kondisi sejahtera (well-being), biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemandirian, keselamatan dan kemakmuran.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan

masyarakat yang selaras dengan standard dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

James Midgley (2009:5) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit).

Kamerman dan Kahn (2009) menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial,

yaitu: (1) pendidikan (2) kesehatan (3) pemeliharaan penghasilan (4) pelayanan kerja (5) perumahan (6) pelayanan sosial personal. Kesejahteraan sebagai sebuah kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah kesejahteraan yg meliputi jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Suriadi (2005:41) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Masyarakat juga disebut sebagai society dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah orang-orang yang berada dalam satu daerah. Masyarakat

yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2009) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyuan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Menurut Ralph Linton dalam Koentjaraningrat (2009) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Hasan Sadily (2012) memberi pengertian bahwa masyarakat ialah kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu. Sedangkan menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan.

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara

prinsip berbeda satu sama lain. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.

Di dalam masyarakat ada pula yang disebut dengan masyarakat aktif adalah masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka, masyarakat pasif adalah masyarakat adalah kelompok masyarakat yang anggotanya kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. Menurut Etzioni dalam masyarakat aktif orang.

Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai warga masyarakat. Dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat desa pemerintah desa salah satunya didukung oleh adanya pengelolaan badan usaha milik desa atau bumdes. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selain itu bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pengaruh rentenir.

Metode Penelitian

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dandangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Masani melalui pengembangan potensi desa yang ada.

Subyek pada penelitian ini adalah para aparat pemerintah desa Masani, dalam hal ini adalah kepala desa beserta dengan aparat desa. Dengan menggunakan metode Purpusive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Kepala desa dan perangkat desa
2. Ketua BPD
3. Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat

Peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa: adalah suatu proses pengungkapan bagaimana pemerintah berperan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa dalam mengembangkan potensi-potensi fisik, maupun non fisik, melalui pemberdayaan masyarakat desa. Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menyusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini nantinya. Peran pemerintah dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Masani merupakan langkah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, sebagai peningkatan kualitas desa. Adapun indikator-Indikator Peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan program peningkatan produksi pertanian serta perkebunan, yang sudah menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Masani.

- b. Pengembangan potensi hasil peternakan.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan program peningkatan produksi hasil peternakan yang ada di desa, dan juga bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program yang di canangkan oleh pemerintah desa guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Agrobisnis peternakan desa.

Peternakan merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa sebagai salah satu sumber penghasilan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah desa kemudian melakukan pengembangan agrobisnis pada peternakan desa untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa.

Hasil Penelitian

Berdasarkan konsep teoritis pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian peranan pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang telah diprogramkan sebelumnya

sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami. Dalam menjalankan program yang ada tentu saja pemerintah dibantu oleh faktor-faktor pendukung yang ada, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut kepala desa Masani:

“kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga pangan, demi terealisasinya hal tersebut, maka dibantu dengan adanya dana comdev, dana comdev tersebut biasanya digunakan untuk menjalankan program-program desa yang meliputi pembangunan fisik untuk pelayanan kesehatan seperti posyandu mentari, selain itu bantuan kepada kelompok tani dan peternak, seperti traktor”

Selain peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemerintah Masani juga memberikan program lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya, program-program tersebut dibantu program dana desa yang merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dan pun bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Menurut ketua tim pengelola Dana Desa, Desa Masani:

“Tujuan pemberian dana desa untuk pembangunan prasarana infrastruktur seperti drainase, jalan serta kebutuhan fisik dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa”.

Potensi lahan yang luas sangat mendukung dalam peningkatan sektor pertanian dan juga perkebunan. Desa Masani merupakan desa yang memiliki

potensi lahan yang luas, untuk tanah sawah yang dimiliki desa Masani sebanyak \pm 1.511 hektar, hal ini tentu saja membuat masyarakat desa memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan produksi pertanian mereka.

Kesejahteraan masyarakat adalah faktor penting dalam peningkatan mutu suatu daerah atau desa, namun terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pemerintah masih kurang dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, dalam kasus ini pemerintah desa Masani kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini :

1. Adanya perubahan pada anggaran belanja desa

DD atau Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa yang berada pada lingkup pemerintah kabupaten tersebut. Dana ini diberikan setiap tahunnya dengan tujuan pembangunan desa. Desa Masani merupakan desa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Poso. Pada tahun 2017 DD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Poso ke pemerintah desa Masani sebanyak Rp. 733.073.983, dana ini kemudian digunakan untuk menjalankan program-program desa.

Perubahan dana desa ini kemudian juga merubah anggaran belanja desa Masani, untuk program-program yang akan di jalankan, dan tentunya merubah anggaran dalam bidang produksi pertanian secara keseluruhan. Menurut Bendahara Desa Masani bahwa Dana Desa pada tahun 2016 lebih banyak disalurkan untuk pembangunan fisik, sehingga untuk pertanian dikurangi. Perubahan anggaran untuk sektor pertanian sendiri berkurang begitu pula dengan sektor peternakan.

Masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan terselenggaranya peningkatan mutu desa. Partisipasi masyarakat adalah faktor yang besar dalam merealisasikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa secara menyeluruh. Namun terkadang masyarakat sendiri kurang memperhatikan kehidupan mereka sendiri. Salah satu hal yang mendasar mengapa kemudian pemerintah desa masih kurang perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya sendiri disebabkan karena kurangnya partisipasi dan juga antusiasme dari masyarakat desa itu sendiri.

Koordinasi Koordinasi adalah Usaha untuk mengharmoniskan dan mensekresikan serta mengintegrasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi merupakan proses mengintegrasikan kegiatan maupun tujuan dari unit-unit kegiatan yang berbeda dalam suatu organisasi ataupun perusahaan agar tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai dengan lebih efisien. Koordinasi antara masyarakat dan juga pemerintah sangat mendukung suksesnya sebuah program yang ada, karena pemerintah harus memahami kondisi serta hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, namun ketika antara masyarakat dan juga pemerintah kurang berkoordinasi maka, program yang ada tentu saja akan ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan dalam peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan ada salah satunya muncul karena kurangnya koordinasi hal tersebut terbukti dengan adanya komplain dari beberapa masyarakat petani dan juga peternak yang ada, yang kemudian berbeda dengan tanggapan dinas pertanian Kecamatan Poso Pesisir

khususnya penyuluh pertanian desa Masani.

Dalam kerangka pembangunan pertanian di kabupaten Poso ke arah masa depan, agroindustri merupakan penggerak utama perkembangan sektor pertanian terlebih dalam masa yang akan datang posisi pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional sehingga agroindustri akan semakin tangguh. Maju dan efisien sehingga mampu menjadi leading sektor dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri, menuju agroindustri yang tangguh, maju serta efisien.

Pada dasarnya Orientasi terhadap industri hasil pertanian sangatlah penting untuk menambah nilai jual komoditas pertanian ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam ciri dan sifat dari agro industri:

- a. sifat produk pertanian yang mudah rusak
- b. sebagian besar produk musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi terjamin
- c. sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah.

Masalah lain dalam peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Masani. Beberapa masalah yaitu: hasil pertanian yang kurang memadai karena kurangnya pengairan yang tidak memadai hal ini sesuai dengan pandangan dari masyarakat: “pertanian kita masih kurang, karena tidak ada pengairan, pengairan yang ada itu hanya swadaya dari masyarakat saja itupun masih kecil, tidak mampu aliri semua

sawah yang ada, jadi kalau musim kemarau sulit untuk mengairi sawah, hal inilah yang juga membuat petani sulit untuk mendapatkan hasil pertanian yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa”.

Selain itu hasil pertanian dan perkebunan yang tidak mencapai target karena kurangnya pengetahuan mengelola sawah dan kebun yang ada. Juga masih menjadi salah satu kendala yang cukup mengganggu masyarakat. Begitu pula Serangan hama yang mengganggu pertanian masyarakat pada saat panen dan juga Harga untuk hasil perkebunan itu sendiri terkadang murah. Hal-hal ini yang menjadi kendala-kendala masyarakat dalam meningkatkan produksi pertanian yang merupakan faktor penting dan prioritas utama kabupaten Poso pada Umumnya dan desa Masani pada khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

1. Pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
2. Pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan.
3. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak .

4. Menetapkan tindakan yang layak, pada tahapan ini pengkajian dititik beratkan pada menentukan / memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji dan dipilih kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan pembangunan skala kabupaten.

Saran

Pemerintah dan masyarakat haruslah saling membantu dan menjaga koordinasi agar terlaksananya program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat benar--benar terealisasikan, karena suatu desa dikatakan makmur dan juga sejahtera ketika masyarakat yang ada di dalamnya juga sejahtera. Selain itu pemerintah sebagai penanggung jawab atas masyarakat juga harus lebih sering lagi memperhatikan apa yang terjadi terhadap masyarakatnya, apakah bantuan- bantuan yang diberikan telah tersalur baik kepada masyarakat yang membutuhkan ataukah masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat sendiri juga tidaklah seharusnya pasif, karena peningkatan kesejahteraan itu bukanlah semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah desa, namun kepentingan dari masyarakat itu sendiri, kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah sangatlah penting guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat desa Masani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo, 2011. Manajemen pemerintahan Daerah. Graha ilmu. Jogja

- Bintarto. 2009. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Cetakan Kesepuluh. GhaliaIndonesia. Jakarta
- Dadang Solihin, MA, Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Huda, Miftachul. 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pelajar
- Hassan Sadily. 2012. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. 9; Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Dadang Juliantara, "Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa", Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2010
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Midgley, James 2009, Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathruhsyah, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Mustopadidjaja, AR. 2010. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN.
- Nasikun, 1993, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Poloma M Margaret, 2010. Sosiologi kontemporer, Rajawali pers, Jakarta
- Rosidin Utang, 2010 Otonomi daerah dan desentralisasi, Pustaka setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 33; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Suud, Mohammad, 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka
- Syafiie, Inu Kencana., 2011, Etika Pemerintahan. Penerbit: PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Wirutomo, Paulus. 2011. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali. Press.
- W.J.S. Poerwadarimta, 2010. Pengertian kesejahteraan manusia, Mizan, Bandung
- Undang-Undang Nomor :6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.